

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SUMBANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Bab I Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah	10
2.1.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4 Review terhadap Renja Kecamatan Sumbang Tahun 2025	48
2.5 Penelaah Usulan Masyarakat	59
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
3.3 Program dan Kegiatan	64
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	78
Bab V Penutup	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Renja Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2025 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum ABPD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai Renja Tahun 2025 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 11 Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ;RKPD. Sementara itu Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Etujuan Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
 31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman penyusunan dalam rencana kerja dan anggaran/RKA kecamatan Sumbang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan RENJA TAHUN 2025 Kecamatan Sumbang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam matrik Renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan pencapaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini Menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 sampai dengan Triwulan II serta pencapaian 2024 terhadap target akhir Renstra 2024-2026.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/4)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100	0	0	0	0	100	100	100%

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29	0	0	0	0	29	29	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	0	0	0	0	14	14	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	0	0	0	0	91	91	0,97%

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92	0	0	0	0	92	92	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	0	0	0	0	100	100	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9	0	0	0	0	9	9	100%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38	0	0	0	0	38	38	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	0	0	0	0	100	100	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	0	0	0	0	12	12	100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100	0	0	0	0	100	100	100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	0	0	0	0	4	4	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	0	0	0	0	100	100	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	0	0	0	0	6	6	100%

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4	0	0	0	0	4	4	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	0	0	0	0	4	4	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	0	0	0	0	100	100	100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60	0	0	0	0	60	60	100%
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	86.15	0	0	0	0	85.95	85.95	0,997%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	0	0	0	0	100	100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	0	0	0	0	100	100	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	0	0	0	0	9	9	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	0	0	0	0	25	25	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	0	0	0	0	100	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	0	0	0	10	10	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	0	0	0	0	24	24	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	0	0	0	2	2	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	0	0	0	0	20	20	0,667%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	0	0	0	0	100	100	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	0	0	0	0	72	72	100%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100	0	0	0	0	100	100	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	0	0	0	0	100	100	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	0	0	0	12	12	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	0	0	0	0	36	36	100%

2.1.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan IV tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kecamatan Sumbang EMONEV

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstr a SKPD pada tahun 2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	
			5		7						12=8+9+10+11		13=12/7*100	
			K	R p	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	%
3	4	4A												
[TUJUAN]Mewujudka n kinerja pelayanan Kecamatan yang prima														
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86		86			86			86		81	94.19
[SASARAN]Meningkat nya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat														

[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.034.998.910		2.034.998.910		2.034.998.910		2.294.996.032	112.78
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang	%	100	100	100		100		100		100	
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang	%	100	100	100		100		100		100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang	%	100	100	100		100		100		100	

[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Sumbang	%	100	100		100		100		110		
[KEGIATAN]	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.060.000		1.060.000		1.060.000			
[INDKEGIATAN]	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	3			3		3		5	166.67
[SUBKEGIATAN]	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				530.000		530.000		530.000			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3			3		3		3	100
[SUBKEGIATAN]	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				530.000		530.000		530.000			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3			3		3		2	66.67

[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.511.299.682		1.511.299.682		1.511.299.682		1.487.472.894		98.42
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3			3		3		3		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.497.399.682		1.497.399.682		1.497.399.682		1.473.032.894		98.37
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12			12		12		13		108.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					13.900.000		13.900.000		13.900.000		14.440.000		103.88
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4			4		4		4		100	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah						49.435.808		49.435.808		49.435.808		205.334.948		415.36
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6			6		6		6		100	

[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.190.000		1.190.000		1.190.000		2.756.500		231.64
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3			3		3		1		33.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.464.608		11.464.608		11.464.608		14.757.200		128.72
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3			3		3		4		133.3 3	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						560.000		560.000		560.000		560.000		100
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2			2		2		2		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.06.04						27.560.000		27.560.000		27.560.000		36.267.000		131.59

Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3			100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.643.200		5.643.200		5.643.200		6.710.500		118.91
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3			3		3		1		33.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.018.000		3.018.000		3.018.000		144.283.748		4780.77
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12			12		12		12		100	
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.500.000		1.500.000		1.500.000		82.352.000		5490.13

[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	2	4	200
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					600.000	600.000	600.000	54.900.000	9150
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	5	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					900.000	900.000	900.000	27.452.000	3050.2 2
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	6	300	
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					441.083.420	441.083.420	441.083.420	432.696.630	98.1

[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					79.602.140	79.602.140	79.602.140	73.999.206	92.96
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.685.000	99.44
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	2	4	200	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					358.781.280	358.781.280	358.781.280	356.012.424	99.23

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		100	
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.620.000		30.620.000		30.620.000		87.139.560	284.58
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	4								100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.800.000		20.800.000		20.800.000		57.737.560	277.58
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8								9	112.5

[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.320.000		8.320.000		8.320.000		15.960.000		191.83
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4			4		4		13		325	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000		1.000.000		1.000.000		992.000		99.2
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	1	1			1		1		1		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX. 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung						500.000		500.000		500.000		12.450.000		2490

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6		6		6		5			83.33	
[PROGRAM]PROGRAM	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.190.000		1.190.000		1.190.000			1.190.000	100
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang	%	100	100		100		100		100			100	
[KEGIATAN]	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.190.000		1.190.000		1.190.000			1.190.000	100
[INDKEGIATAN]	Jumlah jenis pelayanan di kecamatan	Jenis	2	2		2		2		2			100	

[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						440.000		440.000		440.000		440.000		100
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	36		36			36		36		24		66.67
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						750.000		750.000		750.000		750.000		100
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9		9			9		9		9		100
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.690.000		3.690.000		3.690.000		127.632.500		3458.88

[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	%	100	100		100		100		100				
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					3.690.000		3.690.000		3.690.000		127.632.500			3458.88
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	19	19			19		19		19			100
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					750.000		750.000		750.000		300.000			40
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga	7	7			7		7		7			100

	Pembangunan di Desa													
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					750.000		750.000		750.000		99.840.000		13312
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2		2			2						100
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.190.000		2.190.000		2.190.000		27.492.500		1255.37

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	4	4	4	4	100
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					35.250.000	35.250.000	35.250.000	96.938.000	275
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					34.500.000	34.500.000	34.500.000	49.200.000	142.61
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	12	12	12	12	12	100	

[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						33.750.000		33.750.000		33.750.000		49.200.000		145.78
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4		4			4		4		4		100
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						750.000		750.000		750.000				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4		4			4		4		4		100

[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						750.000		750.000		750.000		47.738.000		6365.07
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	4		4			4		4				100
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					750.000		750.000		750.000		47.738.000		6365.07
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4		4			4		4				100

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
[PROGRAM]PROGRA M PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						16.875.000		16.875.000		16.875.000		18.725.000		110.96
[INDPROGRAM]	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Sumbang	%	10 0	10 0			10 0		10 0		10 0		100	
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.875.000		16.875.000		16.875.000		18.725.000		110.96
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	19	19			19		19		19		100	

[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						750.000		750.000		750.000		750.000		100
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7		7			7				7		100
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						16.125.000		16.125.000		16.125.000		17.975.000		111.47
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	2		2			2				2		100

Dari tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Sumbang sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai 100% yaitu Presentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu, Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai mtarget adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan yang sudah tercapai 81 dari target sebesar 86 dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,19.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk percepatan capaian kinerja program di semester II Tahun 2024, antara lain: berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain yang terkait (baik OPD, instansi, maupun pihak lain), melaksanakan persiapan dalam rangka percepatan pelaksanaan program di tahun 2024 dengan rapat koordinasi, pelaksanaan program kerja berdasarkan skala prioritas khususnya yang mendukung pencapaian RPD Pemda dan IKU OPD;
3. Serapan anggaran pada Semester IV Tahun 2023 mencapai 94,75% dengan rincian pagu awal Rp 2.680.313.098,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) terserap Rp 2.539.481.532,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Anggaran Tersebut dijalankan oleh 5 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

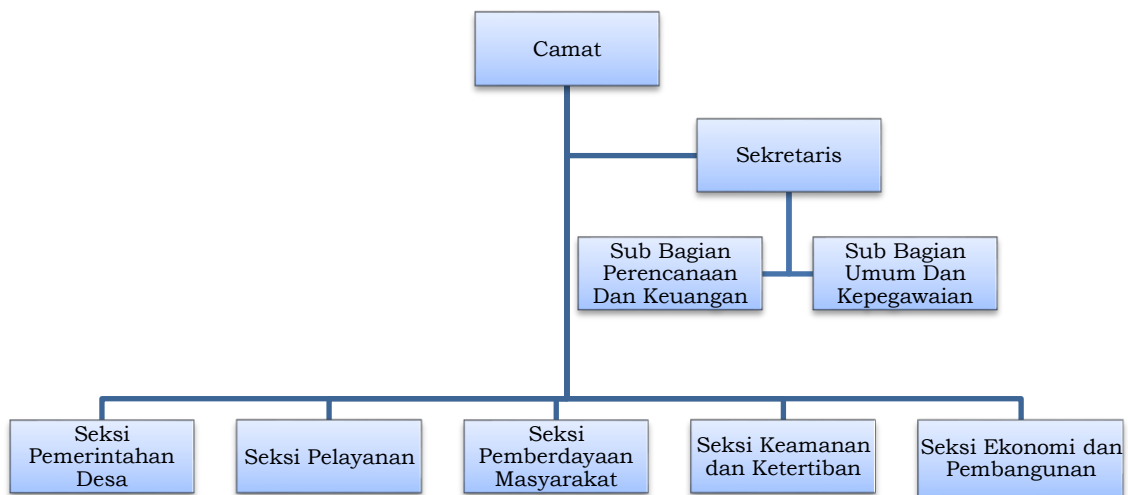
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas

pembantuan., Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa ;
4. Seksi Pelayanan ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
8. Kelompok Jabatan Fungsion

Gambar
Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang



Tabel T.C 30**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah****Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			0	100	100	100	0	34.067	100	100	
2	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan			0	85.95	86.05	86.15	0	82.3	86.05	86.15	
3	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan			0	100	100	100	0	68.13	100	100	
4	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			0	100	100	100	0	53.14	100	100	

5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			0	91	92	93	0	99	92	93	
6	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			0	100	100	100	0	41.67	100	100	
7	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas			0	100	100	100	0	100	100	100	
8	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan			0	100	100	100	0	0	100	100	
9	Persentase APBDes tepat waktu			0	100	100	100	0	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang perlu ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Sumbang, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya IKU OPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan SUMBANG menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan **SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment)**. Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kantor Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 27 orang (10 PNS dan 17 Non PNS) pegawai Kecamatan SUMBANG sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Sumbang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT;
2. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan;
3. Sarana prasarana Kantor perlu adanya penambahan dan penggantian;
4. Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi belum optimal memberikan informasi bernilai guna dalam pengambilan Keputusan;
5. Tuntutan pelaksanaan Musrembang Kecamatan yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrembang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan/kompetensinya;
2. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan;
3. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak;
4. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislative;
5. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
6. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
7. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar;
9. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Sumbang tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil Pembangunan;
2. Kurangnya Pendidikan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan karier dan pelaksanaan tugas pokok;
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Sumbang (tanah longsor, banjir, angin puting beliung);
4. Kurangnya etos kerja;
5. Tingginya tingkat pengangguran;
6. Tingginya jumlah penduduk miskin;
7. Tingginya ancaman bencana;
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan Masyarakat;
9. Keterbatasan pemahaman Masyarakat tentang system dan mekanisme Pembangunan partisipatif;
10. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
11. Perubahan peraturan perundangan;
12. Kejadian luar biasa

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan

hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja OPD se Kabupaten Banyumas yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sumbang.

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka disusun rancangan akhir Renja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD Kabupaten banyumas Tahun 2025 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sumbang Tahun 2025.

Berikut tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Tabel T-C. 31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Rp 2.514.159.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Rp 2.577.524.400
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 5.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 4.370.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 1.895.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 2.475.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	Rp 1.685.138.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	Rp 1.737.287.299

6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Rp 1.665.138.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Rp 1.717.027.299
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	Rp 20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	Rp 20.260.000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Rp 160.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Rp 83.464.061
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3.000.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 8.000.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Rp 15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Rp 2.024.750
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Rp 55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Rp 28.082.000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 7.106.311
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 25.255.000

15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	Rp 10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	7 Dokumen	Rp 9.996.000
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pengadaan Barang	100%	Rp 47.239.120	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100%	Rp 50.750.000
17	Pengadaan Mebel	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp 15.000.000	Pengadaan Mebel	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	Rp 13.750.000
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 22.239.120	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	Rp 22.000.000
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp 10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	Rp 15.000.000
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	Rp 458.781.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100%	Rp 597.053.040
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	Rp 90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	72 Laporan	Rp 90.000.000
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp 7.770.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 358.781.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	Rp 499.283.040

24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 157.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	Rp 104.600.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Rp 65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	Rp 65.000.000
26	Pemeliharaan Mebel	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Rp 12.000.000	Pemeliharaan Mebel	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	Rp 4.000.000
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp 55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	Rp 23.600.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	Rp 1.000.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	Rp 11.000.000
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KABUPATEN BANYUMAS	Indeks kepuasan masyarakat	93 indeks	Rp 29.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KABUPATEN BANYUMAS	Indeks kepuasan masyarakat	93 indeks	Rp 20.699.600
31	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	Rp 3.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	100%	Rp 3.000.000

32	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92 Laporan	Rp 3.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	92 Laporan	Rp 3.000.000
33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	Rp 7.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	100%	Rp 3.600.000
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Rp 7.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	9 Laporan	Rp 3.600.000
35	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	Rp 8.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	100%	Rp 6.600.000
36	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1 Dokumen	Rp 3.600.000

37	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4 Unit	Rp 3.000.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>	4 Unit	Rp 3.000.000
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp 10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100%	Rp 7.499.600
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	Rp 5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	9 Laporan	Rp 3.999.600
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38 Laporan	Rp 5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	38 Laporan	Rp 3.500.000
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 45.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	100%	Rp 29.175.000
42	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	Rp 34.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</i>	100%	Rp 18.100.000
43	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 4.050.000

44	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	Rp 7.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	4 Dokumen	Rp 4.050.000
45	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp 20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	Rp 10.000.000
46	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%	Rp 11.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	100%	Rp 11.075.000
47	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.500.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.600.000
48	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 2.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	4 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 2.475.000
49	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	Rp 5.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	4 Laporan	Rp 5.000.000
50	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	Rp 43.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</i>	100%	Rp 44.750.000

51	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	Rp 39.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	100%	Rp 40.250.000
52	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 35.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	Rp 36.250.000
53	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Rp 4.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Laporan	Rp 4.000.000
54	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	Rp 4.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100%	Rp 4.500.000
55	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Rp 4.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	12 Laporan	Rp 4.500.000
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Rp 32.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</i>	100%	Rp 18.985.000

57	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 32.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	100%	Rp 18.985.000
58	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	Rp 8.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	60 Orang	Rp 9.450.000
59	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	Rp 8.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	60 Orang	Rp 3.575.000
60	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	Rp 8.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	10 Orang	Rp 3.575.000
61	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KABUPATEN BANYUMAS	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	Rp 2.385.000

62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Rp 57.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Rp 29.025.000
63	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	Rp 57.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	Rp 29.025.000
64	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29 Dokumen	Rp 5.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29 Dokumen	Rp 3.600.000
65	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	Rp 6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	Rp 3.600.000
66	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	Rp 42.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	Rp 18.225.000
67	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Dokumen	Rp 3.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KABUPATEN BANYUMAS	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Dokumen	Rp 3.600.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Sumbang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Sumbang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan Sarpras Kecamatan	Kantor Kecamatan Sumbang	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Rp300.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor (Non Jaringan)	Kantor Kecamatan Sumbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp148.650.000	
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya (Jaringan)	Kantor Kecamatan Sumbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp60.800.000	
4	Pengadaan Pendopo Kecamatan	Kantor Kecamatan Sumbang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp750.000.000	Belum Mempunyai Pendopo
				Rp. 1.259.450.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait lainnya.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dalam Rencana Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2025. Adapapun kebijakannya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan Jawa Tengan Tahun 2025 ditujukan pada :

“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih berkarakter”, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah berkelanjutan;
4. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026 mempertimbangkan isu Pembangunan global nasional dan isu strategis Pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dengan tema arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Tata Kelola yang efektif dan Kolaboratif untuk Mendukung Pengembangan Potensi Daerah dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Memperkuat Ketahanan Pangan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan. bab Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan public harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Sumbang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Banyumas :

1. Membangun masyarakat kabupaten banyumas yang sejahtera
2. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang mandiri
3. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju dan berdaya saing
4. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari

Untuk mencapai tujuan banyumas maka kec Sumbang memiliki tujuan berupa Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas. Serta memiliki dua sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Sumbang dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	2.577.524.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp 2.664.207.981
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	KAB. BANYUMAS	5 Dokumen	4.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp 5.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	KAB. BANYUMAS	3 Dokumen	1.895.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	2.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	KAB. BANYUMAS	2 Laporan	2.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	3.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	1.737.287.299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	1.690.138.601
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	KAB. BANYUMAS	12 Orang/bulan	1.717.027.299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	1.665.138.601
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	KAB. BANYUMAS	36 Dokumen	20.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	83.464.061	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	269.788.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	1 Paket	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	4 Paket	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	55.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	10 Paket	2.024.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	24 Paket	28.082.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	85.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	2 Paket	7.106.311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	KAB. BANYUMAS	20 Laporan	25.255.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	83.788.100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	KAB. BANYUMAS	7 Dokumen	9.996.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	50.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	65.000.000
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	1 Unit	13.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	15.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	5 Unit	22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	30.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	4 Unit	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	597.053.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	458.781.280
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	72 Laporan	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	12 Laporan	7.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	KAB. BANYUMAS	12 Laporan	499.283.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	358.781.280
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	104.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	175.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	KAB. BANYUMAS	9 Unit	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	75.000.000
Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	KAB. BANYUMAS	5 Unit	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	15.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	KAB. BANYUMAS	25 Unit	23.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	KAB. BANYUMAS	1 Unit	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	KAB. BANYUMAS	1 Unit	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	15.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	KAB. BANYUMAS	93 indeks	20.699.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	35.000.000

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	4.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	KAB. BANYUMAS	92 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	4.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	9.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	9 Laporan	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	9.000.000

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	12.000.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	KAB. BANYUMAS	1 Dokumen	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	8.000.000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>	KAB. BANYUMAS	4 Unit	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	4.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	7.499.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	KAB. BANYUMAS	9 Laporan	3.999.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	5.000.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	KAB. BANYUMAS	38 Laporan	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	5.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	29.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	48.499.999
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	18.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	34.499.999
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	KAB. BANYUMAS	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	7.000.000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	KAB. BANYUMAS	4 Dokumen	4.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	7.000.000

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	4 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	20.499.999
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	11.075.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	14.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	KAB. BANYUMAS	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	5.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	KAB. BANYUMAS	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	4.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	KAB. BANYUMAS	4 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	5.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	44.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	49.000.000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	40.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp 45.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	12 Laporan	36.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp 35.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	KAB. BANYUMAS	12 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp 10.000.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp 4.000.000

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	KAB. BANYUMAS	12 Laporan	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	4.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	18.985.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	32.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	18.985.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	32.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	KAB. BANYUMAS	60 Orang	9.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	8.000.000

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	KAB. BANYUMAS	60 Orang	3.575.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	8.000.000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	KAB. BANYUMAS	10 Orang	3.575.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	8.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	KAB. BANYUMAS	1 Dokumen	2.385.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	8.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase APBDes tepat waktu</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	29.025.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rp	20.500.000

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	KAB. BANYUMAS	100 %	29.025.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	20.500.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	KAB. BANYUMAS	29 Dokumen	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	6.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	KAB. BANYUMAS	14 Dokumen	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	9.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	KAB. BANYUMAS	6 Dokumen	18.225.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	-
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	KAB. BANYUMAS	24 Dokumen	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rp	5.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUMBANG KAB. BANYUMAS**

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14
		KECAMATAN SUMBANG				2.720.159.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.720.159.000,00			

	Tujuan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			2.720.159.000,00			
	Sasaran	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan			2.720.159.000,00			
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan			2.720.159.000,00			
	7.01	KECAMATAN				2.720.159.000,00			
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah</i>	-	100 %	2.577.524.400,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	5 Dokumen	4.370.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		3 Dokumen	1.895.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		2 Laporan	2.475.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	-	100 %	1.737.287.299,00			Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		12 Orang/bulan	1.717.027.299,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		36 Dokumen	20.260.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	-	100 %	83.464.061,00			Kecamatan Sumbang

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		4 Paket	8.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		10 Paket	2.024.750,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		24 Paket	28.082.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 Paket	7.106.311,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		20 Laporan	25.255.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		7 Dokumen	9.996.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	-	100 %	50.750.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		1 Unit	13.750.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		5 Unit	22.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		4 Unit	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	-	100 %	597.053.040,00			Kecamatan Sumbang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		72 Laporan	90.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	7.770.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	499.283.040,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	-	100 %	104.600.000,00			Kecamatan Sumbang	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		9 Unit	65.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								

			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>		5 Unit	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		25 Unit	23.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1 Unit	1.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1 Unit	11.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	-	93 indeks	20.699.600,00			

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	-	100 %	3.000.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		92 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	-	100 %	3.600.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		9 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	-	100 %	6.600.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							

			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>		1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta							
			<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>		4 Unit	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	-	100 %	7.499.600,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>		9 Laporan	3.999.600,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>		38 Laporan	3.500.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	-	100 %	29.175.000,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</i>	-	100 %	18.100.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.050.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>		4 Dokumen	4.050.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat</i>	-	100 %	11.075.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>		4 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>		4 Lembaga Kemasyarakatan	2.475.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>		4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</i>	-	100 %	44.750.000,00			

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	-	100 %	40.250.000,00			Kecamatan Sumbang
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		12 Laporan	36.250.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>		12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	-	100 %	4.500.000,00			Kecamatan Sumbang
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan</i>		12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang

			<i>Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>						
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</i>	-	100 %	18.985.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	-	100 %	18.985.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>		60 Orang	9.450.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>		60 Orang	3.575.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>		10 Orang	3.575.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		1 Dokumen	2.385.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase APBDes tepat waktu</i>	-	100 %	29.025.000,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	-	100 %	29.025.000,00			Kecamatan Sumbang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		29 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		14 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		6 Dokumen	18.225.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>		24 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sumbang
	J U M L A H					2.720.159.000,00			

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sumbang Tahun 2025. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dokumen rancangan akhir renja 2025 akan digunakan sebagai pedoman penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
2. Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025.
3. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Banyumas

CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200212 1 001